

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Fenomena politik internasional yang selama ini terjadi sangat bersifat dinamis. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan politik yang paling tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ditengah pergolakan situasi politik yang cepat sekali berubah, ada sebuah kekuatan yang lahir dalam diri masyarakat yang mengintegrasikan menjadi sebuah kekuatan otonom dan berdiri sebagai kekuatan pengimbang negara. kekuatan inilah yang muncul di Myanmar, sebuah kekuatan yang mampu mengorganisir dan menjadi motor penggerak bagi masyarakat didalamnya dilakoni oleh kaum agamawan yaitu BIKSU Budha yang kemudian diikuti masyarakat sipil lainnya, kekuatan inilah yang sejak tahun 1988 berada di garda terdepan melawan kebijakan represif pemerintah yang berkuasa.

Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok sipil serta kaum agamawan itu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak baik *state* maupun *non state* dalam mengecam kekerasan yang sering kali dilakukan oleh junta militer Myanmar. Dari sekian banyak negara yang memberi perhatian pada kasus Myanmar, salah satunya adalah negara adi kuasa Amerika Serikat. Amerika Serikat melancarkan sanksi terhadap Myanmar

dalam bentuk Embargo Ekonomi. Untuk Mengetahui lebih lanjut apa yang melatarbelakangi Embargo Ekonomi AS di lancarkan ke Myanmar, penulis tertarik untuk mencoba meneliti mengenai “*Embago Ekonomi Amerika Serikat terhadap Myanmar pada Tahun 2007*”. Penulis akan mencoba meneliti Keterlibatan AS dalam pergolakan politik Myanmar sekaligus menambah pengetahuan bagi penulis tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Bertujuan untuk mengetahui adanya sikap konstruktif Amerika Serikat atas kekerasan dan pelanggaran HAM oleh junta militer terhadap ribuan demonstran dalam memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah Myanmar.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa reaksi dan intervensi dilakukan oleh dunia internasional khususnya negara-negara yang kuat seperti Amerika Serikat dalam menekan junta militer untuk menegakan HAM dan melaksanakan proses demokratisasi Myanmar.
3. Secara tidak langsung penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa kelompok sipil dan sebuah organisasi keagamaan tidak hanya memfokuskan diri pada isu-isu keagamaan namun gerakan sosial yang kuat dari sebuah organisasi tersebut juga mampu menjadi sebuah

kekuatan besar untuk menekan pemerintah dalam merubah tatanan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

4. Sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **C. Latar Belakang Permasalahan**

Sistem negara demokrasi bukanlah suatu tujuan melainkan jalan yang selama ini diyakini paling menjanjikan. Sebagai prinsip sebuah sistem sosial dan politik yang paling baik saat ini demokrasi menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan masyarakat disuatu negara. Secara garis besar, demokrasi adalah sebuah sistem sosial-politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Demokrasi diyakini sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara yang meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi.

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara dan penerapan kebijakan yang tidak demokratis dalam menjalankan ranah pemerintahan menyebabkan berbagai elemen dari masyarakat sipil Myanmar melancarkan bentuk ketidakpuasan mereka atas pemerintah yang berkuasa melalui aksi demonstrasi. Setidaknya ada dua pemberontakan besar di Myanmar sejak tumbangnya pemerintahan

demokratis pada tahun 1962 yaitu aksi demonstrasi pada tahun 1988 yang disebut dengan pemberontakan 8888 dan aksi demonstrasi pada tahun 2007. Kedua aksi pemberontakan itu dilakukan oleh Biksu Budha, para aktivis dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) serta masyarakat sipil lainnya yang pro-demokrasi.

Myanmar yang semula bernama Burma itu adalah sebuah negara kecil di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta orang.<sup>1</sup> Sejak memperoleh kemerdekaannya 4 Januari 1948, Myanmar tidak pernah sepi dengan pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti. Hanya bertahan selama 14 tahun, pemerintahan yang demokratis Myanmar tumbang setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 1962 saat Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil PM U Nu dan kemudian membentuk junta militer. Sejak saat itu, politik tangan besi/rezim otoriter di jalankan oleh Ne Win yang membentuk junta militer sebagai sumber kekuatan.

Di era kepemimpinan Ne Win, perekonomian negara Myanmar semakin memburuk, roda ekonomi digerakkan oleh pasar gelap dan tidak ada celah bagi partisipasi politik warga sipil. Tak jarang junta militer melakukan tindak kekerasan kepada rakyat yang tidak tunduk terhadap peraturan-peraturan yang mereka buat. Selain itu, meski Myanmar dianugerahi kekayaan alam melimpah seperti gas alam, kesejahteraan

---

<sup>1</sup> <http://www.wikipedia.com>

rakyat Myanmar masih jauh panggang dari api, sebab pajak-pajak yang dihasilkan dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh berbagai perusahaan asing lebih banyak masuk ke militer. Rakyat hanya mendapat porsi yang kecil dari pajak hasil eksplorasi SDA tersebut.

Berbagai keterpurukan yang dirasakan oleh Rakyat Myanmar atas rezim junta di negara tersebut akhirnya mendorong rakyat Myanmar melakukan pemberontakan terhadap rezim pemerintah yang berkuasa pada tahun 1988. Gerakan pemberontakan tersebut dipelopori oleh aktivis mahasiswa yang kemudian disokong oleh warga sipil dan ribuan kaum biksu budha. Namun dalam gerakan demonstrasi besar-besaran pada 8 agustus 1988 tersebut direspon oleh pemerintah Myanmar dengan represif.

Untuk menangani aksi protes dari rakyatnya, jendral Saw Maung melakukan kudeta dan membentuk Dewan Restorasi Penegakan Hukum Negara (SLORC). Pada tahun 1989 SLORC mendeklarasikan hukum darurat militer untuk menangani berbagai aksi protes yang semakin meluas. Pada mulanya, para pemimpin militer Myanmar menahan diri mereka dan membiarkan aksi protes terus berlanjut, tetapi setelah satu minggu kemudian ketika aksi terus berlanjut dan semakin besar, junta militer mulai mengambil tindakan. Ratusan tentara dan polisi anti huru hara digerakkan untuk memadamkan aksi protes lebih lanjut sehingga kemudian aksi demo tersebut dibalas dengan gaya penumpasan ala militer

yang brutal hingga berakhir dengan tindak kekerasan oleh tentara terhadap para demonstran. Dalam aksi tersebut setidaknya 3000 orang terbunuh.<sup>2</sup>

Jatuhnya korban dalam demonstrasi di Myanmar serentak menimbulkan reaksi dari pihak internasional seperti negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Peringatan atas tindakan junta itupun dilakukan oleh organisasi internasional, ASEAN dan PBB. Jika Asia lebih memilih cara dengan mengedepankan dialog dan toleransi khas timur kepada pemerintah Myanmar, negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat memilih cara yang lebih keras dalam mengecam kekerasan yang seringkali dilakukan junta militer kepada rakyatnya. Sejak pemberontakan di tahun 1988 yang diikuti dengan penolakan hasil pemilu 1990, kebanyakan bantuan dan investasi pihak asing ke Myanmar mengering.

Namun pada tahun 1988, Hampir mustahil untuk mengungkapkan kebenaran atas berbagai kasus di Myanmar karena saat itu mata-mata pemerintah berkeliaran di mana-mana, junta militer melakukan pengawasan yang ketat terhadap media massa, wartawan terutama wartawan asing sulit untuk bisa mencari berita di negara paling tertutup di dunia itu. Pada peristiwa tahun 1988 itu hanya dapat tersiar dalam bentuk foto dan tayangan video dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Walaupun demikian, kekacauan yang terjadi di Myanmar tahun 1988

---

<sup>2</sup> [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com)

tersebut telah menuai reaksi dari negara Amerika Serikat yang kemudian mengerahkan militernya sekalipun AS belum benar-benar terfokus pada isu demokratisasi Myanmar, namun hal ini merupakan titik awal dan menjadi bukti bahwa kekacauan di Myanmar pada tahun 1988 telah mendapat reaksi dari Amerika Serikat.

Perlawanan rakyat Myanmar terhadap rejim militer untuk menentang kebijakan-kebijakan yang membuat kondisi mereka semakin terpuruk belum berhenti. Hal ini terbukti dengan kemenangan Aung San Suu Kyi, dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilu 1990 yang memang digelar oleh junta militer. NLD memenangi 392 dari 485 kursi di parlemen. Kemenangan kubu demokrasi ini merupakan peluang untuk menciptakan sebuah sistem negara yang demokratis, tetapi kemenangan itu tidak diakui rezim militer.<sup>3</sup>

Kian banyak otoritas junta militer membiarkan Myanmar pada keadaan kacau, sanksi ekonomi mulai dilancarkan kepada Myanmar yang khususnya ditujukan kepada junta militer beserta kroninya oleh negara-negara barat, yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Sejak tahun 1997, Amerika Serikat mulai melancarkan tekanan berupa embargo ekonomi pada Myanmar serta penolakan visa dan pembekuan aset pejabat junta militer Myanmar yang berada di Amerika Serikat.

---

<sup>3</sup> Artikel-detail, Algooth Putranto "*Myanmar, Opium & Darah untuk kepergian Junta*". diakses pada tgl 05 April 2009

Pada 30 Mei 2003, rezim junta menyerang konvoi Aung San Suu Kyi dan kemudian menahan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tersebut yang saat itu tidak diketahui dimana letak penahanannya. Walaupun junta berkilah bahwa penahanan Suu Kyi dilakukan semata-mata hanya untuk keselamatan Suu Kyi namun tindakan militer tersebut itu direspon oleh negara-negara lain dengan melakukan tekanan ekonomi kepada pemerintah Myanmar.

Pada juni 2003, tekanan ekonomi kembali dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintah Myanmar terkait penahanan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi oleh pihak keamanan negara Myanmar. Tekanan ekonomi tersebut terbukti ketika senat AS dengan suara 97 dan hanya 1 yang menolak, mengesahkan larangan impor segala produk dari Myanmar, mulai dari hasil tambang, hasil bumi, sampai hasil industri. Larangan tersebut merupakan hukuman terhadap junta militer yang berkuasa di Myanmar.<sup>4</sup>

Pada tahun 2002, Impor AS dari Myanmar berjumlah total 356 juta dolar AS (sekitar Rp 3 triliun), sedangkan ekspor Amerika ke negara itu bernilai 10 juta dolar. Lebih 85 persen dari ekspor Myanmar ke AS adalah tekstil, pakaian jadi, dan sepatu. Mengaggapi kebijakan senat AS yang melarang impor Myanmar ke AS, Pengusaha pakaian dalam dan sepatu

---

<sup>4</sup> *Senat AS Sahkan Larangan Impor dari Myanmar*,  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0306/13/int5.htm>. 13 juni 2003

Amerika mendukung keputusan tersebut. Selain itu, aset Myanmar yang ada di AS direncanakan akan dibekukan saat itu dan para pejabat negara tersebut tidak akan diizinkan melakukan perjalanan ke negara-negara Amerika.

Dalam meningkatkan tekanannya, Amerika Serikat menghimbau pada negara-negara lain untuk melakukan pengecaman terhadap Myanmar yang seringkali melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM di negaranya sendiri. Selain meminta PBB dan negara-negara lain untuk memberi perhatian pada kasus internal Myanmar, Washington juga mengusulkan pula kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk meninjau ulang pinjaman lunak bagi Myanmar.

Pemerintah Myanmar, yang dikuasai oleh para jenderal itu, seakan kehabisan akal. Selama ini mereka memang nyaris gagal dalam membangun negeri miskin berpenduduk 50 juta jiwa itu. Meski investasi asing masuk melalui mitra dagangnya seperti Cina dan India, namun perekonomian tetap terpuruk karena di satu sisi, tingkat korupsi di dalam negeri kian merajalela. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2007 yang pernah dirilis Transparency International (TI), Myanmar dikategorikan sebagai negara berperingkat IPK terburuk bersama dengan Somalia. Sementara di sisi lain, pemerintah tega mengalokasikan 40 persen dari anggaran negara untuk kepentingan militer yang jumlahnya hanya 450.000 orang. Dengan porsi seperti itu, berkisar 120 kyat (mata uang Myanmar)

mengalir ke tentara, dan hanya 1 kyat mengalir ke rakyat. Sebuah perbandingan yang amat jomplang. Untuk menimbun kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan Militer beserta kroni-kroninya, pemerintah memberhentikan subsidi bahan-bahan bakar dan minyak di negaranya dan memberlakukan kebijakan dengan menaikkan harga BBM mencapai 500% pada tahun 2007.

Menanggapi kebijakan junta, rakyat sontak menolak dan melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut. Aksi demonstrasi besar-besaran pun dilakukan oleh rakyat yang tergabung dari kalangan Biksu Budha, aktivis partai Liga Nasional untuk Demokrasi, dan ribuan masyarakat sipil lainnya yang turut mengecam keputusan Junta. Tak hanya penolakan dari dalam tubuh Myanmar, keputusan Junta juga kembali menarik sorotan dunia internasional saat kelompok yang tidak puas atas kebijakan-kebijakan pemerintahanya, kembali melancarkan aksi protes damai pada bulan September 2007. Aksi ini merupakan aksi terbesar sejak pemberontakan mahasiswa pada tahun 1988. Untuk membubarkan aksi demonstrasi tersebut, junta militer bergerak dengan melakukan tindakan kekerasan. Sepanjang Gelombang protes terjadi, 13 orang tewas termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang ini

memicu protes Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan dicabutnya beberapa bantuan Jepang kepada Myanmar.<sup>5</sup>

Burma sebagaimana sebutan Departemen Luar Negeri AS kepada Myanmar terus menerus berada dalam kekacauan yang dituainya sebagai hasil dari sanksi-sanksi ekonomi, isolasi politik, dan salah kelola pemerintahan. Selain itu, terjadi pula kekacauan etnis, meluasnya kemiskinan, dan krisis ekonomi yang terus menerus melanda rakyat Myanmar meski tanah dan lepas pantai mereka mengandung cadangan minyak dan gas yang melimpah.

Hingga terjadinya aksi pemberontakan oleh kaum sipil pada tahun 2007, gerakan demokrasi Myanmar tetap saja mengalami kebuntuan. Kekuasaan junta militer yang selama ini didukung Cina masih tetap bercokol kuat tak bergeming. Cina memang telah menjadi mitra terbaik bagi Myanmar, ia memberikan bantuan pada junta militer, karena di balik itu Cina memiliki kepentingan yang sangat besar atas Sumber Daya Alam Myanmar dan kekuasaan di tangan Junta akan mendukung kepentingan Cina atas Myanmar.

Sikap berbagai negara pun dalam menanggapi kasus yang terjadi Myanmar sangat beragam. Sikap ini ditentukan oleh banyak hal, salah satunya yaitu sejauh mana kedekatan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis terutama pola relasi ekonomi suatu negara dengan

---

<sup>5</sup> [http://www.indogamers.com/f144/demokratisasi\\_di\\_myanmar-35561/index5.html](http://www.indogamers.com/f144/demokratisasi_di_myanmar-35561/index5.html)

Myanmar. Isu demokrasi sering hanya ditempatkan sebagai problem instrumental. Sebaliknya jika isu demokrasi justru menghambat proses relasi kebijakan liberal ini, maka isu ini kerap akan didiamkan dan tidak menjadi target penyelesaian. Contoh yang sangat kentara diperlihatkan oleh sikap politik yang diambil negeri-negeri barat. Mereka terlihat sangat setengah hati untuk bersikap terhadap Junta karena pertimbangan akses keberlanjutan relasi politik dan ekonomis dengan Myanmar. Kasus ini membuktikan secara lebih jelas bahwa proses demokratisasi tidaklah hanya berbicara pada akses kepentingan politik semata melainkan lekat dengan kepentingan dasar ekonomi.

Awalnya, Hubungan kerjasama ekonomi Amerika Serikat merupakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Hal ini terbukti dengan adanya korporasi asing dari amerika serikat yang berdiri di Myanmar seperti Chevron. Investasi Chevron yang berada di Myanmar dari produksi gas alam dan Pipelines.

Sebelum dijatuhkannya Embargo Ekonomi oleh Amerika Serikat, kerjasama dalam hubungan ekonomi juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Myanmar dalam bentuk ekspor impor. Semula, Amerika Serikat mengekspor barang-barang canggih ke Myanmar, seperti komputer berteknologi tinggi dan Amerika Serikat menerima impor barang-barang dari Myanmar seperti tekstil, pakaian, sepatu, dan barang konsumsi lainnya dari Myanmar yang tercatat senilai US\$ 356 juta (Rp 295 miliar)

pada tahun 2002, Sedangkan ekspor Amerika ke negara Myanmar bernilai 10 juta dolar.<sup>6</sup>

Namun jika dilihat, Amerika begitu gencarnya melakukan kecaman bahkan sanksi berupa Embargo pada Myanmar, padahal investasi perusahaan Amerika seperti Chevron, perusahaan Amerika yang telah membeli Unic, memiliki 28% saham atas tambang di Myanmar. Perusahaan ini berusaha keras untuk membela diri atas investasinya di Myanmar.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan mengenai: ***“Mengapa Amerika Serikat Melakukan Embargo Ekonomi terhadap Myanmar pada Tahun 2007?”***

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum, terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu. Dengan

---

<sup>6</sup> *Senat AS Sahkan Larangan Impor dari Myanmar*,  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0306/13/int5.htm>. 13 juni 2003

dalil tersebut kita dapat melanjutkan penelitian dalam meramalkan rangkaian peristiwa selanjutnya.

Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang mampu menjawab pertanyaan “Mengapa”, artinya berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada suatu fenomena yang terjadi. Atau juga bisa dikatakan teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>7</sup>

### **Konstruktivisme**

Konstruktivisme merupakan teori alternatif yang turut mewarnai teori hubungan internasional modern. Sejak tahun 1980, kehadiran konstruktivisme dianggap sebagai teori dinamis, tidak semena-mena, dan secara kultural berbasis pada kondisi-kondisi sosial. Teori ini berasumsi pada pemikiran dan pengetahuan manusia secara mendasar. Adanya *nature* dan *human knowlege* dari tiap individu mampu mentransfor fenomena atau realita sosial ke dalam pengetahuan ilmu-ilmu sosial.

Tokoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel, Kant, dan Grotius, yang kental dengan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin, mulai bermunculan para konstruktivis yang cenderung berfikir tentang politik internasional, yakni Karl Deutch, Ernst Haas dan Hedley Bull. Tokoh konstruktif lain adalah Friedrich Kratochwill (1989), Nicholas Onuf (1989), dan Alexander Wendt (1992)

---

<sup>7</sup> Mas'oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Displin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta:1990, hal,30

Kunci pemikiran Konstruktivisme adalah dunia sosial, termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia.

Wendt berasumsi bahwa :

*The way international politics is conducted is made, not given, because identities and interests are constructed and supported by intersubjective practice.*<sup>8</sup>

Pemikiran Wendt tersebut menegaskan bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, bukanlah struktur yang hukumnya diteliti secara ilmiah dan muncul secara alamiah, seperti yang dikemukakan teori positivis melalui interpretasi naturalistik (indrawi). Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif, dimana masyarakat yang membuat dan memahaminya. Hakekat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan, strukturasi dan verstehen dalam speech acts.

Di dalam tulisan Alexander Wendt yang berjudul “Anarchy is what state make of it”, dikemukakan bahwa sistem anarki internasional tercipta karena adanya pemaksaan realisme secara konfliktual sekaligus

---

<sup>8</sup> Alexander Wendt, “Levels of Analysis vs. Agents and Structures: Part III”, *Review of international studies* 18 (1992), 183

pemaksaan kaum liberalis untuk membuat tindakan kooperatif.<sup>9</sup> Anarki adalah apa yang dibuat negara tersebut. Disini terlihat bahwa sikap negara merupakan faktor deterministik dalam mewujudkan sistem negara itu sendiri.

Konstruktivisme berbeda dengan realisme dan liberalisme yang berfokus pada material (kasat mata) seperti *power* dan perdagangan. Konstruktivisme memberikan perhatian kajiannya pada persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas dibentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan bagaimana ide dan identitas membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi di sekitarnya.

Menurut Wendt, eksistensi realitas konstruktivisme selalu bersifat subyektif, tidak hanya pada konteks materi melainkan juga dunia sosial. Orang berinteraksi dalam sistem hubungan internasional idealnya berdasarkan pada keyakinan terhadap nilai teori *state-centric structural*. Intinya, hubungan internasional dapat terjadi jika sebelumnya telah dikondisikan konstruksi secara sosial dengan mengabaikan dan menafikkan fakta-fakta transhistoris seperti yang dianut oleh faham realisme dan neorealisme selama ini.

Setelah menelaah teori konstruktivisme, dan diimplementasikan kedalam tindakan aksiologis sesuai dengan pertanyaan awal. Mengenai kebijakan konstruktif pemerintah Amerika Serikat mengenai tindakan

---

<sup>9</sup> Alexander Wendt. "*Constructivism : Is Anarchy what states make of it?*" 1992. Hal. 63

represif junta militer Myanmar terhadap rakyatnya, perilaku Amerika Serikat memang menunjukkan adanya kontribusi aktif dalam menekan Junta militer. Sejak pada tahun 1988 dimana saat itu terjadi demonstrasi besar di Myanmar, Amerika Serikat mulai menunjukkan sikapnya. Hal ini juga didukung dengan sikap Amerika Serikat yang menggalang dukungan kerta mlakukan kerjasama dengan ASEAN, PBB dan Uni Eropa untuk memberikan perhatian pada kasus di Myanmar.

Embargo Ekonomi terus dilancarkan Amerika Serikat ketika negara Myanmar tetap pada tindakan represifnya dalam merespon para demonstran. Embargo yang memang sudah dilaksanakan sejak tahun 1997 tak menggubris eksistensi tindakan junta militer. Sehingga sanksi ekonomi pun terus dilancarkan hingga pada tahun 2007 akibat tindak represif junta kepada demonstran yang mengakibatkan 13 orang tewas termasuk wartawan asing dari Jepang.

Jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme Alexander Wendt, sikap negara Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh identitas negara yang seringkali menjuluki dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan berperan sebagai salah satu paru-paru dunia.

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mengambil hipotesis bahwa Amerika Serikat

memberlakukan kebijakan luar negerinya berupa Embargo Ekonomi terhadap Myanmar karena Amerika Serikat ingin menekan tindakan represif junta militer Myanmar dan menegakan Hak Azasi Manusia di negara tersebut.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian merupakan suatu upaya untuk menghindari penulisan yang terlalu melebar sehingga mengaburkan pokok permasalahan yang telah direncanakan. Oleh karena itu diperlukan batasan masalah yang menjadi ruang lingkup penulisan ini. Untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini pada Embargo Ekonomi Amerika Serikat terhadap Myanmar pada tahun 2007, dimana pada tahun ini Amerika Serikat mengesahkan Larangan Impor segala jenis produk dari Myanmar.

Dalam lingkup waktu, penulis juga akan mengambil beberapa fakta reaksi AS pada tahun 1988 terhadap Myanmar sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, dimana pada tahun tersebut juga terjadi pemberontakan besar yang dimotori oleh aktivis pro demokrasi dan kaum agamawan biksu budha. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil fakta-fakta terkait yang terjadi diluar jangkauan penelitian ini sebagai bahan pembanding untuk memperkuat analisa penulis.

## H. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah sesuai dengan kriteria keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, diktat, jurnal, artikel, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan seperti data-data yang diperoleh dari Internet.

### 2. Teknik analisa data

Setelah data bersifat kualitatif yang diperlukan terkumpul, penyusun mengadakan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan pola sebagai berikut:

#### a. Induktif

Yaitu bermula dari fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### b. Deduktif

Yaitu metode yang digunakan dengan cara membawa data yang bersifat umum menuju kerangka pembahasan yang khusus.

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan terperinci dalam masing-masing bab dijelaskan dalam sub-sub bab. Setiap bab, dalam pembahasannya memiliki saling keterhubungan guna membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis.

Pada Bab I akan berisi Pendahuluan yaitu : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah penelitian ini, Pokok Permasalahan yang diteliti, Kerangka Pemikiran yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, Hipotesis atau kesimpulan awal, Metodologi Penelitian yang digunakan untuk memaparkan penelitian ini secara ilmiah, sistematis dan runtut, jangkauan penelitian untuk membatasi penelitian agar memiliki batasan yang jelas, serta Sistematika Penulisan.

Pada Bab II akan berisi tentang sejarah tumbuhnya demokrasi di Amerika Serikat dan dukungannya terhadap pertumbuhan demokrasi di dunia serta bagaimana peran elit-elit politik Amerika Serikat dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Bab III akan berisi tentang Dinamika dan Sejarah Politik Myanmar, bagaimana Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Myanmar pada tahun 1988 dan 2007 dan Kekerasan yang dilakukan oleh Junta militer Myanmar dalam merespon aksi-aksi tersebut.

BAB IV akan berisi bagaimana sikap konstruktif Amerika Serikat terhadap kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap rakyatnya pada tahun 2007 dan apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat atas keinginannya menciptakan keamanan dan tumbuhnya prinsip-prinsip demokrasi di Myanmar serta apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menekan junta militer untuk menghargai setiap hak azasi warganya dan tidak melakukan tindak kekerasan pada rakyatnya.

Bab V akan berisi kesimpulan dari semua isi materi penulisan penelitian yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.